



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



## The Influence of Human Resources Competence, Quality of Accounting Information Systems, and Internal Control Systems on the Quality of Financial Reports in the Humbang Hasundutan Regency Government

Pengaruh Kompetensi Sdm, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Mega Simanullang <sup>1</sup>, Azizul Kholis <sup>2</sup>, Zahri Fadli<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>3</sup>Akuntansi, Politeknik LP3M Unggul

### Keywords:

*human resource competence, quality of accounting information systems, internal control systems, quality of local government financial reports.*

**Abstract.** The purpose of this study was to determine the effect of human resource competence, the quality of accounting information systems, and internal control systems on the quality of financial reports at the Regional Government Organization of Humbang Hasundutan Regency. There are 29 Humbang Hasundutan OPD offices for this research population. The sampling technique used was saturated sampling, with a research sample of 58 people. Data collection techniques using a questionnaire and data analysis techniques using multiple linear regression with the help of SPSS version 24. Partial test results show that the variabel of human resource competence has a significant positive effect on the quality of local government financial reports. The variabel of quality of the Accounting Information System partially has a significant positive effect on the quality of local government financial reports. The variabel of internal control system has a significant positive effect on the quality of local government financial reports. The test results show that simultaneously the competence of human resources, the quality of the accounting information system and the internal control system have a positive effect on the quality of local government financial reports.

Corresponding author\*

Email: [azizulkholis@unimed.ac.id](mailto:azizulkholis@unimed.ac.id)



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

## 1. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban pengelolaan di pemerintahan pusat ataupun daerah. Lingkup sektor publik menjadi sorotan karena banyaknya pandangan negatif oleh beberapa pihak akan dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan adanya tuntutan akuntabilitas dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Akuntabilitas publik merupakan upaya pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal yang dievaluasi secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah informasi yang disediakan pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan kepada publik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah untuk periode tertentu (Faturey Et al., 2021). PP No.8 tahun 2006 menjelaskan jika “laporan keuangan merupakan upaya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah sepanjang satu periode”. Oleh karena itu, instansi pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun laporan yang mempunyai kualitas dan akuntabel sejalan dengan standar yang telah diberlakukan untuk dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Sebuah Laporan keuangan dapat dikategorikan mempunyai kualitas apabila dalam penyajiannya memuat informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. PP No.71 Tahun 2010 Tentang SAP, menyebutkan ada 4 kriteria kualitatif yang menjadi ketentuan normatif laporan keuangan pemerintahan agar bisa dikategorikan berkualitas. Keempat karakteristik tersebut terdiri dari: relevan, handal, dapat dibandingkan, serta dapat untuk dipahami.

Opini yang dikemukakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merupakan cerminan untuk melihat kualitas sebuah laporan keuangan. Opini yang diberikan merupakan pernyataan terkait pemeriksaan atas laporan keuangan untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang tersaji di dalamnya ([bpk.go.id](http://bpk.go.id)). Dalam melakukan penilaian LKPD, ada 4 jenis opini/ pernyataan yang diberikan oleh BPK diantaranya: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Tidak Memberi Pendapat (TMP) (UU No.15 Tahun 2004).

Dari hasil temuan yang dilakukan oleh BPK dalam lima tahun terakhir ini (2016-2020) opini pada pelaporan keuangan pemerintah daerah seluruh Indonesia mengalami peningkatan. Pernyataan ini dibuktikan dengan kenaikan opini WTP dari persentase 70% pada tahun 2016, naik ke 76% di tahun 2017, meningkat 82% di tahun 2018 dan kenaikan masing-masing 90% ditahun 2019 dan 2020 ([bpk.go.id](http://bpk.go.id)). berdasarkan hasil temuan tersebut berarti dalam menyajikan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan daerah telah disusun dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Namun sejalan dengan pelaksanaannya, masih banyaknya penemuan oleh badan pengawas Keuangan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pengalokasian anggaran sehingga akuntabilitas publik tersebut tidak terlaksana. BPK masih menemukan banyaknya kelemahan pada sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan mengungkap adanya 5.367 permasalahan yang terdiri atas 1.699 (32%) permasalahan tentang kelemahan dalam pengendalian penyajian maupun pelaporan,



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

2.498 (46%) dimana permasalahan menyangkut kesenjangan sistem pengendalian terhadap pengalokasian APBD, serta 1.170 (22%) permasalahan tentang struktur pengendalian intern dalam penyajian LKPD tahun 2020. Selain itu BPK juga mengungkap 6.295 permasalahan terkait penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian negara, potensi kerugian serta kekurangan penerimaan. (IHPS I tahun 2021).

Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK pada LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2018-2020, BPK memberikan opini yang ditunjukkan di dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Hasil Pemeriksaan BPK**

Tahun Anggaran	Opini BPK
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Berdasarkan hasil temuan BPK terkait pemeriksaan LKPD, pemerintahan kabupaten Humbang Hasundutan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berurut. Ini menandakan pada saat pelaporan sudah tersaji dan dapat dikatakan sudah berkualitas. Namun kenyataannya dalam penyajian laporan keuangan, BPK masih banyak menemukan penyimpangan dan lemahnya penerapan sistem pengendalian dan ketidakpatuhan. Pada tahun Anggaran 2018 BPK mengungkapkan terdapatnya penyimpangan sistem pengendalian dalam menyusun laporan keuangan diantaranya: 1) Realisasi belanja modal melampaui anggaran sebesar Rp 802.958.978,00 2) pemanfaatan dan penatausahaan aset tetap masih belum sepenuhnya tertib dan kurang memadai, 3) pengelolaan tambahan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran sekretariat daerah tidak tertib (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

BPK mengungkap adanya kelemahan sistem pengendalian intern pada periode pelaporan tahun 2019, adapun kelemahan tersebut yaitu 1) ditemukannya kesalahan klasifikasi penganggaran belanja pada dua unit organisasi perangkat daerah, 2) penetapan perubahan APBD TA 2019 terlambat dan realisasi pembelanjaan modal atau peralatan maupun aset lainnya yang melampaui anggaran, 3) belum memadainya penatausahaan aset tetap (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

Pada Laporan Keuangan TA 2020 BPK juga mengungkap beberapa penyimpangan pada sistem pengendalian intern serta ketidaktaatan pada peraturan perundang-undangan diantaranya adalah 1) Penatausahaan aset tetap kendaraan belum sepenuhnya memadai, adanya perubahan APBD tahun 2020 tidak disepakati oleh DPRD, 3) adanya kekurangan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebanyak Rp 111.780.000,00, 4) terdapat kelebihan pembayaran bahan bakar minyak sebesar Rp 51.836.250,00 (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

Dalam proses penyusunan LKPD, ada banyak faktor pendukung dalam proses penyusunannya, sumber daya manusia (SDM) adalah sebuah unsur penting serta penentu keberhasilan penyajian laporan



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

keuangan. Baik buruknya Laporan Keuangan disebabkan oleh kompetensi dari manusianya (Subrata dalam Trisnawati & Wiratmaja, 2018). Pemahaman serta keahlian dalam menyajikan sebuah laporan keuangan akan berdampak pada kualitas akhir yang dihasilkan.

Laitera at el., (2021) mengatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD, semakin berkompeten sumberdaya manusianya maka laporan yang akan dihasilkan akan semakin baik. Upaya dalam peningkatan kompetensi manusia dapat dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan. Sejalan dengan Ramadhani at el., (2019) mengemukakan pengaruh positif kualitas LKPD berasal dari Kompetensi sumber daya manusia. Namun, ini dibantah oleh Pangestu at el., (2019) memperlihatkan tidak ditemukannya kualitas sumber daya manusia memengaruhi kualitas LKPD.

Selain itu, sistem informasi akuntansi (SIA) berperan penting pada proses penyusunan laporan keuangan. Semua organisasi memerlukan informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat, dasar pembuatan keputusan yang tepat diperlukan sebuah sistem untuk mengumpulkan dan mengelolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang utuh. Pemerintah Daerah telah ditugaskan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dimana untuk mempermudah proses penyajiannya dibutuhkan sistem informasi akuntansi (Pura, 2021). Dengan adanya SIA dapat mempermudah para pembuat laporan keuangan untuk menyusun informasi keuangan dan beroperasi sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Sistem informai akuntansi diharapkan dapat memberikan informasi keuangan untuk melakukan pengembangan program yang direncanakan dan pengevaluasian kinerja (Bastian, 2007).

Rohmah at el., (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif SIA dalam mempengaruhi kualitas LKPD. Hal ini berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu mengaplikasikan sistem informasi akuntansi secara tepat, keamanan sistem, akan mendapat hasil yang berkualitas. Namun berbeda dengan Pura (2021) yang menyimpulkan bahwa SIA mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan mempengaruhi kualitas LKPD, berarti bahwa sistem informasi akuntansi tidak memberikan pengaruh apabila dalam menjalankan sistem tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Faktor selanjutnya adalah sistem pengendalian internal (SPI) dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dilaksanakan oleh pihak BPK setiap tahunnya masih mengungkap adanya kelemahan SPI di instansi pemerintahan. Tindakan palanggaran yang dilakukan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab timbul karena adanya celah atas lemahnya penerapan sistem pengendalian dalam lembaga. pengaplikasian yang baik terhadap sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintahan mempunyai dampak dalam hasil akhir laporan keuangan (Ramadhaniat el., 2019). Sejalan dengan Trisnawati & Wiratmaja (2018), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa SPI berdampak positif pada kualitas LKPD, semakin baik pengaplikasian SPI maka kualitas laporan akan semakin baik. Namun berbanding terbalik dengan Hasanah & Siregar (2021) yang menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh SPI pada kualitas LKPD. Kondisi ini disebabkan kurangnya pengawasan yang diterapkan oleh pemimpin dalam rangka penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

Berdasarkan fenomena-fenomena dan research gap yang dikemukakan diatas, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sangatlah penting. Jenis penelitian ini sudah ramai dikaji oleh peneliti terdahulu, namun hanya saja hasil penelitian terdahulu belum konsisten hasilnya. Karena perbedaan hasil tersebut peneliti hendak melakukan penelitian untuk pengujian dengan menggunakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Penelitian ini adalah replika dari Trisnawati & wiratmaja (2018) yang meneliti Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah menambahkan variabel independen yaitu variabel kualitas sistem informasi akuntansi karena dianggap penting, alasan penambahan variabel ini adalah sesuai dengan PP RI No.8 Tahun 2006 Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pasal 6 ayat 2 menyatakan jika sistem akuntansi yang diterapkan oleh instansi pemerintahan berkaitan erat dengan tingkat keandalan laporan keuangan. Sistem akuntansi harus diterapkan dan sesuai pada SAP dengan melihat situasi pendukung yang dibutuhkan. selain itu Pura (2021) juga berpendapat bahwa keberadaan sistem informasi akuntansi akan mempermudah pemerintahan daerah untuk menyajikan laporan pertanggungjawabannya.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan pertama kali dicetuskan pada tahun 1976 oleh Jensen & Mackling. Teori keagenan ialah suatu perjanjian yang menyertakan dua pihak atau lebih, yang mana pihak yang satu sebagai prinsipal yang berperan untuk memberikan mandat dan pihak lainnya sebagai agen berperan untuk menjalankan tugas dan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban kepada prinsipal (Jensen & Mackling dalam Tingginehe, 2021). Teori keagenan menggambarkan suatu konsep hubungan diantara prinsipal (pemberi kontrak) dengan agen (penerima Kontrak), dalam hal ini prinsipal melakukan kontrak perjanjian dengan agen untuk bekerja sama dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Supriyono, 2018).

Teori keagenan dapat juga diterapkan dalam lingkungan instansi pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintahan didasari oleh teori keagenan, sebagai pendekatan dalam menganalisis kebijakan publik (Lane dalam Hasanah dan Siregar : 2021). Teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah yang berperan sebagai agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala pengelolaan pemerintah berupa laporan keuangan kepada pemangku kepentingan selaku prinsipal.

Teori Keagenan beranggapan dengan kesadaran penuh pemerintahan daerah berperan menjadi agen untuk masyarakat (prinsipal) akan berbuat untuk kepentingannya sendiri, oleh sebab itu pemerintah tidak dapat diberikan kepercayaan dalam bertindak untuk kepentingan masyarakat. Ketidaksamaan kepentingan diantara prinsipal dan agen memicu timbulnya masalah keagenan. Dengan adanya teori keagenan pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi melalui akuntabilitas. Agar tuntutan akuntabilitas tersebut terpenuhi pemerintah menyediakan laporan keuangan yang berkualitas untuk upaya pertanggungjawaban. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diantaranya, kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal.

### Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

Menurut PP No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa “laporan keuangan merupakan upaya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama periode tertentu”. Laporan keuangan adalah tahapan akhir dari siklus pencatatan akuntansi yang telah dilakukan dalam menyediakan keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dalam menentukan kebijakan.

Sesuai PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa “pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan OPD (Organisasi Perangkat daerah).

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah satuan normatif yang diperlukan untuk memperoleh informasi akuntansi untuk mencapai tujuan”. Dalam pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif dapat dipakai sebagai dasar untuk mempertimbangkan kualitas laporan keuangan. Ada 4 karakteristik kualitatif dalam pelaporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang kompeten ditandai adanya keterampilan erat kaitannya pada pengetahuan, keahlian, serta sifat kepribadian dengan secara langsung mempengaruhi kinerjanya (Mangkunegara, 2018). SDM tergolong aset yang terpenting dalam organisasi dikarenakan memberikan kontribusi besar dalam kegiatan beroperasi dalam pencapaian tujuan (Wulandari & Rahmat, 2020).

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil mengatakan bahwa: Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi ialah pengetahuan tentang hal-hal yang dilakukan seseorang agar dapat menangani pekerjaannya secara efektif dan efisien. Efisiensi menghemat waktu dalam melakukan aktivitas, sehingga memungkinkan untuk membuat laporan keuangan tahunan dan menyajikannya dengan benar dalam laporan. Semakin singkat waktu pelaporan keuangan, semakin cepat proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Untuk melakukan pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang baik, Organisasi Perangkat daerah harus mempunyai staf yang kompeten. Setiap entitas harus mengelolah Sumber daya manusianya dengan baik, untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan lembaga, dengan adanya keseimbangan tersebut entitas dapat beroperasi secara produktif. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, penempatan posisi pegawai harus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya (Mangkunegara, 2018:1). Latar belakang pendidikan, keahlian dalam bidang keuangan, adanya program pelatihan dan pendidikan untuk mengasah kemampuan dibidang akuntansi serta memiliki banyak pengalaman didalam bidang keuangan menjadi hal penting dalam pelaksanaan tugas serta kewajiban dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan dengan baik dan mempunyai kualitas.

## **Sistem Pengendalian Internal**



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

Sistem pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang melakukan pengarahan, pengawasan serta penilaian sumber daya dalam sebuah lembaga dengan maksud untuk melakukan pendeteksian atas tindakan kecurangan (fraud) (Yaqin & Jatmiko, 2018). Sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa: Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai unuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Sistem pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai metode atau kombinasi langkah-langkah yang diterapkan dalam lingkungan organisasi untuk menjaga keamanan aset, memeriksa ketepatan sistem pencatatan akuntansi, meningkatkan efesiensi kegiatan operasional serta kepatuhan atas kebijakan administrasi yang telah disusun sebelumnya. Perancangan sistem pengendalian intern secara otomatis agar setiap pihak organisasi bisa saling memeriksa.

Dari pengertian tersebut disimpulkan sistem pengendalian internal merupakan sebuah sistem atau metode dengan secara sengaja dibuat dan diterapkan di lingkungan organisasi agar terjaganya keefektifan kegiatan operasional, keamanan serta untuk menghindari adanya kecurangan dengan demikian tujuan dapat tercapai dengan baik. Pengaplikasian sistem pengendalian intern oleh instansi pemerintah sangat penting untuk penyusunan laporan keuangan. Semakin membaiknya penerapan sistem pengendalian internal organisasi, akan semakin baik kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya. (Pura,2021)

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem yang diterapkan secara serentak di lingkungan pemerintahan Pusat maupun pemerintahan daerah (PP Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang SPIP). Tercapainya sistem pengelolaan keuangan Negara secara akuntabel, harus didukung oleh adanya kewajiban dari pemimpin lembaga seperti gubernur, walikota/Bupati untuk menerapkan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan Humbang Hasundutan, waktu pelaksanaan penelitian bulan Maret 2022 sampai selesai. Keseluruhan objek baik itu berupa manusia, hewan, dan tumbuhan, dengan karakteristik yang telah ditentukan untuk dijadikan data penelitian dikatakan sebagai populasi (Sugiyono, 2015). Yang menjadi populasi penelitian ini yaitu seluruh pejabat pemerintahan yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah pada OPD pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara. Metode pemilihan sampel didalam penelitian ini memakai metode sensus yaitu penentuan sampel dengan menggunakan elemen populasi sebagai sampel (Sugiyono: 2015).

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah kuantitatif deskriptif. Ikhsan & Ghozali (2006) mengatakan bahwa kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bisa menciptakan temuan penelitian yang dapat diukur dan dideskripsikan dalam bentuk angka maupun numerik (statistik). Sumber data untuk penelitian ini yaitu data primer, dimana data didapatkan langsung oleh peneliti pada



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

saat melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penggunaan kuesioner, dimana mengumpulkan data dilakukan melalui pemberian daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan maksud mendapat jawaban dari daftar pertanyaan yang diberikan (Sugiyono: 2015). Untuk mengetahui pengukuran sikap, pendapat dan persepsi individu atau kelompok dapat dinilai melalui skala likert.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Humbang Hasundutan. Jumlah OPD sebanyak 29 kantor dengan masing- masing jumlah responden untuk setiap kantornya sebanyak 2 orang. Adapun responden pada penelitian yaitu pegawai bagian keuangan, yang terdiri dari Kasubbag keuangan dan Bendahara, yang langsung terlibat didalam menyusun laporan keuangan daerah kabupaten Humbang Hasundutan. Metode dalam pengumpulan data penelitian memakai tehnik penyebaran kuesioner secara langsung. Sebelum kuesioner disebarkan peneliti melapor kepada Badan penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan izin melakukan penelitian di kantor OPD Humbang Hasundutan. Setelah mendapat izin, pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022 peneliti menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner. Hasil dari kuesioner yang terkumpul kemudian ditabulasikan dalam Microsoft excel yang kemudian akan diolah melalui SPSS versi 24.

Terdapat 58 kuesioner yang disebarkan pada 29 OPD Humbang Hasundutan, namun yang dapat diolah hanya 51 kuesioner karena sebanyak 7 kuesioner tidak dikembalikan kepada peneliti. Berikut ini disajikan tabel penyebaran dan pengembalian kuesioner.

### Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan dan bendahara keuangan. Beberapa karakteristik responden penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan serta lama menjabat tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Karakteristik Responden**

Keterangan		Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	17	33.3
	Perempuan	34	66.7
Usia	31-40	27	52.9
	41-50	22	43.1
	>50	2	3.9
Pendidikan terakhir	D3	5	9.8
	S1	35	68.6
	S2	11	21.6
Latar Belakang Pendidikan	Akuntansi	10	19.6
	Manajemen	21	41.2
	Ekonomi	10	19.6
	Hukum	4	7.8
	Lain-lain	6	11.8



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

Jabatan	Kasubbag Keuangan	25	49.0
	Bendahara	26	51.0

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yang mana sebesar 33.3% sejumlah 17 orang laki-laki dan 66.7% sejumlah 34 orang perempuan.
- 2) Karakteristik responden dari segi usia, yang mana sebanyak 27 orang atau 52.9 % berusia 31-40 tahun, 22 orang atau 43.1 % berusia 41-50 tahun dan sebanyak 2 orang atau 3.9 % berusia > 50 tahun.
- 3) Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, yaitu sebanyak 5 orang atau 9.8% Jenjang D3, 35 orang atau 68.6% jenjang S1 dan sebanyak 11 orang atau 21.6% jenjang S2.
- 4) Karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan dikehui bahwa, sebanyak 10 orang atau 19.6 % berasal dari bidang ilmu Akuntansi, 21 orang atau 41.2% dari Manajemen, sebanyak 10 orang atau 19.6 % dari Ekonomi, 4 orang atau 7.8% dari Hukum dan 6 orang atau 11.8 % dari bidang ilmu lainnya.
- 5) Karakteristik responden berdasarkan jabatan, dimana sebanyak 25 orang atau 49.0 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian keuangan dan 26 orang atau 51.0% menjabat sebagai bendahara.
- 6) Karakteristik responden berdasarkan lama menjabat, diantaranya 19 orang responden 37.3% telah bekerja 1-5 tahun, 26 orang atau 51.0% telah bekerja selama 6-10 tahun, 6 orang atau 11.7 % bekerja >10 tahun.

## Hasil Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang dipakai dalam penelitian. Uji validitas memakai uji kolerasi *person product* moment. Data memuhi asumsi validitas dan dinyatakan valid jika ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ).

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Item Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
X1.1	0.739	0.2759	Valid
X1.2	0.651	0.2759	Valid
X1.3	0.654	0.2759	Valid
X1.4	0.789	0.2759	Valid
X1.5	0.809	0.2759	Valid
X1.6	0.767	0.2759	Valid
X1.7	0.664	0.2759	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data primer oleh SPSS. 2022

Dari tabel 3 terlihat bahwa variabel sumber daya manusia dengan 7 item pernyataan dinyatakan valid karena hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Sistem Informasi Akuntansi**

Item Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
X2.1	0.566	0.2759	Valid
X2.2	0.582	0.2759	Valid
X2.3	0.514	0.2759	Valid
X2.4	0.661	0.2759	Valid
X2.5	0.795	0.2759	Valid
X2.6	0.780	0.2759	Valid
X2.7	0.811	0.2759	Valid
X2.8	0.811	0.2759	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data primer oleh SPSS. 2022

Dari tabel 4 terlihat bahwa variabel kualitas sistem informasi akuntansi dengan 8 item pernyataan dinyatakan valid karena berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sistem Pengendalian Internal**

Item Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
X3.1	0.524	0.2759	Valid
X3.2	0.631	0.2759	Valid
X3.3	0.786	0.2759	Valid
X3.4	0.697	0.2759	Valid
X3.5	0.419	0.2759	Valid
X3.6	0.348	0.2759	Valid
X3.7	0.467	0.2759	Valid
X3.8	0.533	0.2759	Valid
X3.9	0.289	0.2759	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data primer oleh SPSS. 2022

Dari tabel 5 terlihat bahwa variabel sistem pengendalian internal dengan keseluruhan item pernyataan, dinyatakan valid karena hasil pengujian menunjukkan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Item Pernyataan	rhitung	rtabel	Keterangan
Y.1	0.757	0.2759	Valid
Y.2	0.709	0.2759	Valid
Y.3	0.698	0.2759	Valid
Y.4	0.685	0.2759	Valid
Y.5	0.648	0.2759	Valid
Y.6	0.720	0.2759	Valid
Y.7	0.697	0.2759	Valid
Y.8	0.679	0.2759	Valid
Y.9	0.724	0.2759	Valid



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

Y.10	0.747	0.2759	Valid
------	-------	--------	-------

Sumber : Hasil pengolahan data primer oleh SPSS. 2022

Dari tabel 6 terlihat bahwa variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, item pernyataan 1 sampai 10 dinyatakan valid karena berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

## Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat keakuratan serta konsistennya instrument penelitian yang dipakai dalam suatu penelitian. Uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini apabila instrument telah dinyatakan valid dalam uji validitas yang telah dilakukan sebelumnya. Pengujian reliabilitas yang memakai teknik cronbach alpha ( $\alpha$ ), dimana cronbach alpha  $> 0.60$  maka dapat diartikan telah reliablenya instrument penelitian yang digunakan.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kompetensi SDM	0.846	Reliabel
2.	Kualitas SIA	0.838	Reliabel
3.	SPI	0.673	Reliabel
4.	Kualitas LKPD	0.895	Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data primer oleh SPSS, 2022

Pada tabel 7 nilai perolehan *cronbach alpha*  $> 0.60$  disimpulkan bahwa keempat variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel.

## Hasil Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 <sup>a</sup>	.645	.623	2.545
a. Predictors: (Constant), SPI, Kualitas_SIA, Kompetensi_SDM				

Sumber: Hasil pengolahan data primer oleh SPSS, 2022

Berdasar Output SPSS yang dipaparkan dalam tabel 4.13 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.623. Angka tersebut memperlihatkan variabel independen yang terdiri dari kompetensi SDM, kualitas sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal menjelaskan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 62,3 % dan selebihnya 37.7% dijelaskan oleh variabel lain.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

## 2. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji parsial atau uji t dipergunakan dalam menguji seberapa kuat secara parsial variabel independen memengaruhi variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji parsial (Uji T)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.610	3.963		1.416	.164
	Kompetensi_SDM	.296	.103	.300	2.871	.006
	Kualitas_SIA	.521	.142	.426	3.670	.001
	SPI	.533	.230	.245	2.317	.025

a. Dependent Variabel: Kualitas LKPD

Sumber : Hasil pengolahan data primer oleh SPSS, 2022

Berdasarkan hasil output SPSS yang dimuat dalam tabel 4.14 diatas,dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Variabel Kompetensi SDM (X1) memiliki nilai t hitung 2.871 > nilai t tabel 1.67793 serta nilai signifikan sebesar 0.006 < 0.05 . Hal ini diartikan jika secara parsial Kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD ( H1 diterima).
- b. Variabel kualitas SIA (X2) memiliki nilai t hitung 3.670 > dari nilai t tabel 1.67793 dan nilai signifikan sebesar 0.001 < 0.05. Hal ini diartikan jika secara parsial Kualitas SIA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD (H2 diterima).
- c. Variabel SPI memiliki nilai t hitung 2.371 > dari nilai t tabel 1.67793 dan nilai signifikan sebesar 0.025 < 0.05. Hal ini diartikan jika secara parsial SPI mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD (H3 diterima).

## 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F dipergunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	554.145	3	184.715	28.513	.000 <sup>b</sup>
	Residual	304.482	47	6.478		
	Total	858.627	50			



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

a. Dependent Variabel: Kualitas\_LKPD

b. Predictors: (Constant), SPI, Kualitas\_SIA, Kompetensi\_SDM

Sumber : Hasil pengolahan data primer oleh SPSS, 2022

Terlihat pada tabel 4.15 nilai F hitung senilai 28.513 > dari nilai F tabel 2.80 dengan signifikan  $0.000 < 0.05$ . Ini dapat diartikan bahwa kompetensi SDM, kualitas sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada taraf signifikan = 5% (H4 diterima).

## Pembahasan

### Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian untuk variabel kompetensi SDM mempunyai t hitung senilai 2.871 > 1.67793 t tabel dengan nilai signifikan  $0.006 < 0.05$  dapat diartikan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk butir pernyataan X1.1 mengenai pemahaman pencatatan siklus akuntansi sesuai dengan ketentuan berlaku diperoleh jawaban responden sebanyak 21 orang menjawab SS (Sangat Setuju), 22 orang menjawab S (Setuju) dan 8 orang menjawab N (Netral) . Dari hasil perolehan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai keuangan OPD Humbang Hasundutan telah memahami pencatatan siklus akuntansi dengan baik.

Untuk butir pernyataan X1.2 diperoleh jawaban responden sebanyak 18 orang menjawab SS, 23 orang menjawab S dan 10 orang menjawab N. dari hasil perolehan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai OPD Humbang Hasundutan telah memahami peraturan No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual dengan baik.

Butir pernyataan X1.3 diperoleh jawaban responden sebanyak 6 orang menjawab SS, 29 orang menjawab S, 12 orang menjawab N dan 2 orang menjawab TS. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai OPD Humbang Hasundutan telah mampu mempunyai kemampuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sebagian pegawai disimpulkan kurangnya kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan ini diindikasikan oleh latar belakang pendidikan yang kurang sesuai.

Butir pernyataan X1.4 diperoleh jawaban responden sebanyak 10 orang menjawab SS, 31 orang Menjawab S, 9 orang menjawab N dan 1 orang menjawab TS (Tidak Setuju). Dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar dari pegawai OPD Humbang Hasundutan, untuk memperdalam keterampilan dalam bidang akuntansi dapat dengan rutin membaca atau mempelajari literatur berupa jurnal ilmiah dan buku-buku pengetahuan terkait akuntansi.

Butir pernyataan X1.5 diperoleh jawaban responden sebanyak 11 orang menjawab SS, 26 orang menjawab S, 10 orang menjawab N, 2 orang menjawab TS dan 2 orang menjawab STS (Sangat Tidak Setuju). Dapat diinterpretasikan bahwa Pegawai OPD Humbang Hasundutan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai penatausahaan keuangan untuk meningkatkan keterampilan. Tujuan untuk mengikuti pelatihan tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan responden yang kurang sesuai, untuk



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

mengatasi kendala tersebut maka dengan pelatihan akan membantu dalam pemahaman pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Butir pernyataan X1.6 diperoleh jawaban responden sebanyak 23 orang menjawab SS, 19 orang menjawab S dan 8 orang menjawab N. Butir pernyataan X1.7 diperoleh jawaban responden sebanyak 22 orang menjawab SS, 22 orang menjawab S dan 7 orang menjawab N. Dapat diinterpretasikan bahwa Pegawai keuangan OPD Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugasnya yaitu menyusun laporan keuangan dengan mengedepankan moral dan kode etik seorang akuntan.

Hasil penelitian ini menjelaskan jika kompetensi sumber daya manusia baik maka kualitas laporan keuangan juga akan baik. Semakin kompeten Sumber daya manusia akan semakin efektif dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan. Kompetensi SDM merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi. Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, kompetensi sumber daya manusia sebagian besar didukung dari jenjang pendidikan pegawai, bidang ilmu serta mengikuti pelatihan dalam bidang keuangan secara rutin oleh pegawai keuangan OPD Humbang Hasundutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Trismawaty & Wiratmaja (2018) mengatakan bahwa adanya pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat pendidikan yang baik erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang kompeten.

Wulandari et al (2020) juga mengungkapkan adanya pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Laitera et al (2021) juga mengatakan bahwa Kompetensi SDM juga mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas LKPD. Kompetensi SDM didukung oleh pendidikan dan pelatihan, memiliki integritas dalam menjalankan tanggungjawabnya. Berbanding terbalik pada penemuan Agustiningtyas (2020) yang memperlihatkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak adanya pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia. Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah kompetensi SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana semakin berkompeten SDM maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

## **Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah**

Pada hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Kualitas sistem informasi akuntansi memiliki nilai t hitung  $3.670 > 1.77793$  t tabel dengan nilai signifikan  $0.001 < 0.05$ . Sehingga diartikan jika kualitas sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif signifikan. Kualitas sistem informasi akuntansi yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Butir Pernyataan X2.1 diperoleh hasil jawaban responden sebanyak 26 orang menjawab SS, 23 orang menjawab S dan 2 orang menjawab N. Dapat diinterpretasikan bahwa kantor OPD Humbang Hasundutan telah menjalankan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan SAP berbasis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah perlu diperhatikan apakah sistem informasi akuntansi yang dijalankan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual ini dikarenakan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar pencatatan yang berlaku



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

Butir pernyataan X2.2 diperoleh jawaban responden sebanyak 16 orang menjawab SS, 30 orang menjawab S dan 5 orang menjawab N. Dapat diinterpretasikan bahwa OPD Humbang Hasundutan menjalankan sistem informasi akuntansi yang berpedoman pada prinsip pengendalian intern yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang ketat melalui pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi dapat memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Butir pernyataan X2.3 diperoleh jawaban responden sebanyak 14 orang menjawab SS, 30 orang menjawab S dan 7 orang menjawab N. Dapat diinterpretasikan bahwa sistem informasi akuntansi di OPD Humbang Hasundutan sudah dijalankan secara konsisten dan periodik. Dengan menjalankan Sistem informai akuntansi yang semakin baik dapat menciptakan informasi keuangan untuk pengembangan perencanaan program dan penilaian kinerja yang baik.

Sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden prosedur akuntansi telah dijalankan sesuai dengan standar pencatatan yang berlaku umum. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan pencatatan dan pengelolaan data dalam menyajikan laporan keuangan. Dengan menjalankan prosedur penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi selain kas akan mempermudah penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah telah ditugaskan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dimana untuk mempermudah proses penyajiannya dibutuhkan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat menciptakan pelaporan yang berguna apabila diaplikasikan secara maksimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan Rohma et al (2020) mengatakan bahwa adanya pengaruh positif sistem informasi akuntansi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menjalankan sistem akuntansi pemerintah, terjaminnya keamanan, waktu pelaporan yang tepat serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Laitera at el (2021) bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem informasi akuntansi akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Namun, hal berbeda oleh Wulandari & Rahmat (2020) yang menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel sistem pengendalian internal memperoleh nilai t hitung > dari t tabel ( $2.371 > 1.67793$ ) dengan nilai signifikan  $0.025 < 0.05$ . Berarti bahwa secara parsial sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal merupakan aktivitas berkelanjutan yang dilaksanakan oleh atasan dan staf pegawai dalam mencapai keefektifan dan keefisienan dalam tujuan organisasi. Dengan menjalankan sistem pengendalian internal dengan tepat, tujuan dan fungsi pemerintahan pada tingkat kegiatan dan pengendalian dalam kebijakan administratif, standar akuntansi dan standar lainnya, dapat



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

diidentifikasi dan di evaluasi. Semakin baik sistem pengendalian internal maka akan menaikkan kualitas laporan keuangan yang disusun.

Butir pernyataan X3.1 diperoleh jawaban responden sebanyak 18 orang menjawab SS, 31 orang menjawab S dan 2 orang menjawab N. Dapat diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendalian OPD Humbang Hasundutan telah tercipta dan terjaga perilaku positif dengan tujuan untuk mendukung manajemen yang sehat. Butir pernyataan X3.2 diperoleh jawaban responden sebanyak 13 orang menjawab SS, 32 orang menjawab S dan 6 orang menjawab N. Dapat diketahui bahwa struktur organisasi di OPD Humbang Hasundutan tergambar dengan baik. Dengan adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab secara jelas akan mempermudah untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang telah diberlakukan.

Butir pernyataan mengenai penilaian resiko berdasarkan hasil jawaban responden X3.3 sebanyak 17 orang menjawab SS, 32 orang menjawab S dan 2 orang menjawab N. butir pernyataan X3.4 sebanyak 14 orang menjawab SS, 35 orang menjawab S dan 2 orang menjawab N. Dari hasil perolehan tersebut diketahui pimpinan OPD Humbang Hasundutan dengan baik melakukan analisis resiko terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan dan untuk meminimalisir segala bentuk keurangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Butir pernyataan aktivitas pengendalian diperoleh jawaban responden untuk X3.5 sebanyak 25 orang menjawab SS dan 26 orang menjawab S. Pernyataan X3.6 sebanyak 17 orang menjawab SS dan 34 orang menjawab S. Dapat diketahui bahwa aktivitas pengendalian pada OPD Humbang Hasundutan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai arahan dari pimpinan serta pegawai telah memahami maksud dan tujuan dari aktivitas pengendalian.

Butir pernyataan X3.7 diperoleh jawaban responden sebanyak 23 orang menjawab SS dan 28 orang menjawab S. Disimpulkan bahwa pada OPD Humbang Hasundutan penyampaian informasi dilaporkan secara tepat waktu. Pemantauan sistem pengendalian intern juga diterapkan dengan menindaklanjuti setiap hasil temuan maupun saran yang diberikan oleh BPK sebagai tindak lanjut untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan dimasa yang berikutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pura (2021), mengatakan bahwa adanya pengaruh positif sistem pengendalian internal secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SPI memiliki peranan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga ditekankan untuk menerapkan SPI dilingkungan pemerintahan secara efektif dan efisien. Hasil ini juga sejalan dengan Faturey et al (2021) mengatakan adanya pengaruh positif signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Philadelphina et al (2020) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak ada pengaruh pada kualitas laporan keuangan.

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah**



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

Berdasarkan hasil secara simultan yang menunjukkan perolehan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $28.513 > 2.80$ ) dengan signifikan ( $0.000 < 0.05$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan nilai dari informasi yang diberikan untuk dapat dipahami serta dapat memenuhi kepentingan pemakai laporan untuk menentukan keputusan. Sebuah laporan keuangan dapat dikategorikan sebagai laporan berkualitas jika informasi yang tercantum didalamnya relevan untuk digunakan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan serta bisa dipahami oleh para penggunanya.

Kompetensi sumber daya manusia ialah kecakapan yang tertanam dalam diri individu baik pengetahuan, keterampilan, serta perilaku atau sikap dan secara langsung dapat berpengaruh terhadap kinerjanya. Sumber daya manusia termasuk hal yang penting dalam organisasi dikarenakan SDM yang akan berperan untuk mengendalikan elemen lainnya dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin berkompeten SDM maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sistem Informasi akuntansi merupakan serangkaian prosedur atau sistem yang dirancang dengan tujuan untuk pengumpulan data serta mengolah data keuangan untuk menciptakan informasi yang lengkap berupa laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah ialah proses bertahap mulai proses pendataan hingga tahap pelaporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kualitas sistem informasi akuntansi yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang digunakan dalam mengukur serta memantau perilaku antar individu dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencegah atau mendeteksi adanya perilaku kecurangan dalam organisasi. Pengendalian internal mencakup kebijakan dan tata cara yang diaplikasikan dalam pencapaian tujuan, memastikan atau memberikan informasi keuangan yang terpercaya, dan memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. semakin baik sistem pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Kompetensi SDM secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin kompeten sumber daya manusia maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas.
- Kualitas sistem informasi akuntansi secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin berkualitas sistem informasi akuntansi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
- Kompetensi SDM, kualitas sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

- Agustiningtyas,at el.(2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pada Opd Kota Malang: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi :8(1), 1–14.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.(2021).Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021
- Bastian,Indra. (2007). Sistem Akuntansi Sektor Publik.Jakarta: Salemba Empat. Dewi,Nur Fitri, et al.,(2019). Factors Influencing The Information Quality Of Local Government Financial Statement And Financial Accountability: licensee Growing Science, Canada doi: 10.5267/j.msl.2019.5.013
- Faturey,at el.(2021).Pengaruh Penerapan Standar Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Conference on Economic and Business Innovation. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ghozali,Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta:Universitas Diponegoro.
- Hasanah,S., dan Siregar T.R.,(2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia UNIMED. Vol : 9 No : 1, 2021.
- Hasanah, Siti.(2021). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhan Batu. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Hasibuan.Anggie Novitasari.(2020).Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,Kompetensi Sumber Daya Manusia,dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di OPD Kabupaten Asahan). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- <https://humbanghasundutankab.go.id>
- Ikhsan, Arfan & Ghozali, Imam. (2006).Metodologi Peneilitian Untuk Akuntansi dan Manajemen. Medan: Madju
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Laitera, at el.(2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Pada OPD Kabupaten Maluku Barat Daya). 1(April), 74–80.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

Laudon, Kenneth, C. & Laudon, Jane, P. (2018). Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat): Jurnal EL-RIYASAH, 9(1), 7.

Pangestu, at el. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Philadelphialia, at el. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research. Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2020 : 17-35 P- ISSN: 2721-5474, 2(1), 17–35.

Pujanira, Putriasri. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Pura, Rahman. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Jurnal Akmen. Volume 18 Nomor 1 April 2021 Hal. 1 - 13 e-ISSN : 2621-4377 & p-ISSN : 1829-8524

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018, pp. 8-17



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947

- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2019). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten):Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(1).
- Rohmah, L., Noor Shodiq Askandar, & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Jurnal E-Jra, 43–51.
- Romney, M. B., & Steintbart, P. J. (2019). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono.(2015). Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D).Bandung:Alfabeta.
- Supriyono,R.A. (2018).Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tingginehe, at el.(2021).Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kasus Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1), 1352–1359.
- Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: E-Jurnal Akuntansi..
- Triyanti.(2017).Pengaruh,Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah kabupaten Magelang). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yograkarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
- Wulandari,A.M., & Rahmat, D.(2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: SKPD Kota DKI Jakarta)
- [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor: Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 2(1), 1–10.